

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (13), pengertian Pasar Modal adalah “Kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”. Penawaran Umum adalah “kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (15)”, pengertian Efek diatur dalam Pasal 1 ayat (5) “Efek adalah Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek”.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 terdapat 16 Badan atau lembaga yang terlibat di pasar modal yaitu Anggota Bursa Efek, Biro Administrasi Efek, Emiten, Kustodian, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Manajer investasi, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Penasihat Investasi, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Perseroan, Perusahaan Publik, Wali Amanat, Perusahaan Efek, dan Bursa Efek Indonesia. (www.sahamok.com)

Bursa Efek Indonesia merupakan hasil penggabungan antara Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES) yang terjadi pada 30 November 2007. Dalam Bursa Efek Indonesia memiliki 24 Indeks salah satu diantaranya merupakan Indeks LQ45. (www.idx.co.id)

Indeks LQ45 merupakan salah satu Indeks yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdiri dari 45 emiten yang telah melalui proses seleksi dengan nilai pasar dan likuiditas (*LiQuid*) yang tinggi dalam perdagangan saham. Indeks ini menggunakan 45 emiten yang terpilih yang disesuaikan setiap enam bulan sekali yaitu pada awal bulan Februari dan Agustus. Dengan demikian, saham

yang terdapat dalam Indeks tersebut akan selalu berubah. Tujuan diluncurkannya Indeks LQ45 adalah untuk dapat menjadi pelengkap dari IHSG, khususnya untuk menyediakan sarana yang obyektif dan terpercaya bagi analisis keuangan, manajer investasi, investor, dan juga pemerhati pasar modal dalam memonitor pergerakan harga dari saham-saham yang aktif diperdagangkan. Sehingga kriteria suatu emiten untuk dapat masuk dalam perhitungan Indeks LQ45 adalah:

1. Telah tercatat di Bursa Efek Indonesia minimal tiga bulan.
2. Aktivitas transaksi di pasar reguler yaitu nilai, volume, dan frekuensi transaksi.
3. Jumlah hari perdagangan di pasar reguler.
4. Kapitalisasi pasar pada periode waktu tertentu.
5. Selain mempertimbangkan kriteria likuiditas dan kapitalisasi pasar tersebut, akan dilihat juga keadaan keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan tersebut.

(www.sahamok.com)

Perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 adalah perusahaan-perusahaan yang berkinerja baik dan memiliki tingkat likuiditas yang baik. Penetapan harga saham yang masuk ke dalam perusahaan LQ45 akan dievaluasi dan ditetapkan kembali setiap enam bulan sekali. Tujuan pengumuman ini adalah menginformasikan kepada investor secara teoritis dimana saham-saham yang terdaftar dalam LQ45 memiliki tingkat risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan saham lainnya karena tingkat likuiditasnya lebih tinggi, selain itu saham Indeks LQ45 merupakan saham yang paling aktif yang diperdagangkan dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Untuk mempertahankan posisi perusahaan pada Indeks LQ45 maka manajemen harus tetap bekerja keras untuk mempertahankan posisinya. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan tersebut, penulis mengindikasikan adanya praktik perataan laba untuk mempertahankan laba yang mampu menarik minat investor serta eksistensi perusahaan di Indeks LQ45 sehingga penulis bermaksud melakukan penelitian *income smoothing* yang terjadi pada perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 selama tahun 2014-2018.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Dari gambaran umum objek penelitian yang telah dikemukakan bahwa perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 menuntut perusahaan untuk memberikan laporan keuangan yang baik dalam likuiditasnya. Dalam PSAK 1 (2015) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia memiliki pengertian dari laporan keuangan adalah “Suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Adapun tujuan laporan keuangan menurut PSAK 1 (2015) “Untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik”. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas pengguna sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut Fahmi (2011) menambahkan bahwa, “definisi laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi perusahaan mengenai kinerja perusahaan”. Salah satu indikator utama dalam laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan adalah laba. Maka dari itu, Informasi mengenai laba suatu perusahaan dapat menjadi sangat material karena laba perusahaan merupakan informasi yang penting bagi publik maupun investor dalam mengambil suatu keputusan. Menurut Setyani dan Wibowo (2019), “Laba merupakan elemen yang paling menjadi perhatian pemakai karena angka laba diharapkan cukup kaya untuk merepresentasi kinerja perusahaan secara keseluruhan”. Namun pada kenyataannya, manajemen melakukan *dysfunctional behavior* (perilaku tidak semestinya) terhadap informasi laba yang diberikan kepada para penggunanya.

Menurut Amirullah dan Budiyono (2004) dalam penelitian Handayani (2016), “berdasarkan asumsi sifat dasar manusia, maka manusia akan bertindak *opportunistic* seperti halnya manusia akan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan umum”. Berlandaskan pada kenyataan, tidak jarang laporan keuangan hanya digunakan untuk mengetahui informasi laba saja tanpa melihat bagaimana proses laba tersebut didapatkan. Hal inilah yang mendorong timbulnya perilaku menyimpang yaitu praktik manajemen laba.

Manajemen laba menurut Schipper dalam Subramanyam dan Wild (2010:131), “manajemen laba dapat didefinisikan sebagai intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi”. Sedangkan menurut Sulistyanto (2008) bahwa secara umum, manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan “untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui pemegang saham yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan”.

Menurut Scott (2000) dalam Fiscal dan Steviany (2015), “pola manajemen laba dapat dilakukan dengan 4 cara yaitu (1) *Taking a Bath* (2) *Income Minimization* (3) *Income Maximization* (4) *Income Smoothing*”. Sering kali manajer melakukan satu atau kombinasi dari tiga strategi ini pada waktu yang berbeda untuk mencapai tujuan manajemen laba jangka panjang. Menurut Widyaningsih (2001) dalam Sari dan Oktavia (2019), “manajemen mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindakan yang dapat membuat laporan keuangan menjadi baik”. Salah satu bentuk dari tindakan ini adalah praktik *income smoothing* yang pada dasarnya merupakan tindakan yang dinilai bertentangan dengan tujuan perusahaan.

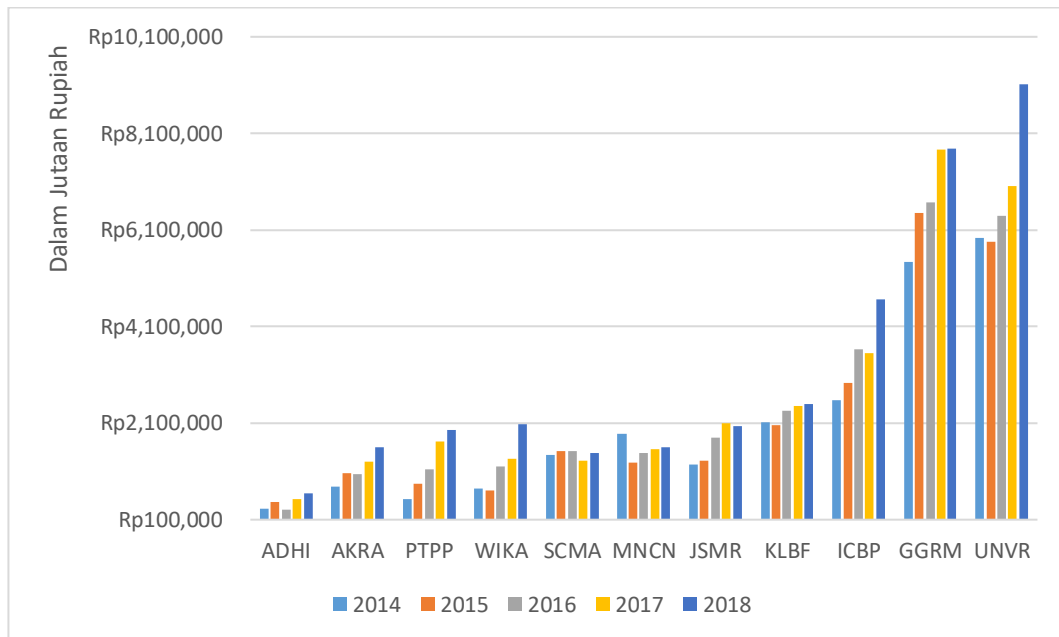
Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan, menurut penulis manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dengan cara memanipulasi data atau informasi akuntansi agar jumlah laba yang tercatat dalam laporan keuangan sesuai dengan keinginan manajer, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan perusahaan, salah satu dari pola manajemen yang dilakukan adalah perataan laba (*income smoothing*).

Menurut Subramanyam dan Wild (2010:132) menyatakan bahwa, “perataan laba (*income smoothing*) merupakan bentuk umum manajemen laba. Pada strategi ini manajer meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi fluktuasinya”. Hal ini membuat manajemen tertarik melakukan perataan laba “karena manajemen menyukai perusahaan yang memiliki laba rata begitu juga investor karena laba yang rata atau stabil dianggap normal bagi perusahaan” Azhara et al. (2018).

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan, menurut penulis praktik perataan laba merupakan tindakan yang umum dilakukan oleh banyak perusahaan di Indonesia. Dengan pihak perusahaan melakukan praktik perataan laba ini diharapkan dapat memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi penilaian kinerja perusahaan dan menarik investor untuk melakukan penanaman modal di perusahaan tersebut. Penggunaan praktik perataan laba telah banyak digunakan sebagai topik penelitian-penelitian sebelumnya.

Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah *financial leverage*, kepemilikan publik, dan komite audit. Alasan pemilihan variabel-variabel tersebut karena masih ada penelitian-penelitian sebelumnya masih banyak terdapat inkonsistensi yang ada dari hasil penelitian mengenai praktik perataan laba (*income smoothing*) yang telah dilakukan sebelumnya. Perataan laba tidak dapat diketahui secara langsung oleh investor. Namun praktik perataan laba dapat diketahui dengan membandingkan koefisien variasi untuk perubahan laba bersih dalam satu periode dengan koefisien variasi untuk perubahan penjualan dalam satu periode. “Jika koefisien variasi perubahan penjualan lebih besar daripada koefisien variasi perubahan laba maka perusahaan tergolong melakukan perataan laba. Perbandingan tersebut menghasilkan suatu Indeks yang disebut Indeks Eckel” (Setyaningtyas dan Hadiprajitno, 2014).

Fenomena perataan laba (*income smoothing*) di Indonesia diduga terjadi pada beberapa perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45. Peneliti menemukan fenomena perataan laba pada grafik berikut:



Gambar 1.1 Grafik Laba Bersih Perusahaan Indeks LQ45 Tahun 2014-2018

Sumber: Data yang telah diolah (2019)

Berdasarkan grafik pada Gambar 1.1 terdapat perusahaan-perusahaan yang terdaftar di LQ45 dijadikan sampel penelitian selama lima tahun berturut-turut di tahun 2014-2018 memiliki laba bersih yang tidak terlalu berfluktuatif. Berikut adalah beberapa penjelasan atas Gambar 1.1:

PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) memiliki laba bersih relatif stabil pada tahun 2014-2018, dimana pada tahun 2014 memperoleh laba bersih sebesar Rp 326.656.000.000, kemudian di tahun 2015 laba yang diperoleh meningkat sebesar Rp 465.026.000.000 atau 29,75%, pada tahun 2016 mengalami penurunan laba yang diperoleh sebesar Rp 315.108.000.000 atau 32,24%, namun di tahun 2017 kembali meningkat laba yang diperoleh sebesar Rp 517.060.000.000 atau 39,58%, kemudian pada tahun 2018 laba yang diperoleh meningkat kembali sebesar Rp 645.029.000.000 atau 19,83%.

PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) memiliki laba bersih relatif stabil pada tahun 2014-2018, di mana pada tahun 2014 memperoleh laba bersih sebesar Rp 1.448.274.225.000, kemudian di tahun 2015 laba yang diperoleh meningkat sebesar Rp 1.524.996.907.000 atau 5,03%, pada tahun 2016 mengalami penurunan laba yang diperoleh sebesar Rp 1.513.628.912.000 atau 0,75%, kemudian pada tahun

2017 kembali mengalami penurunan sebesar Rp 1.317.748.064.000 atau 12,94%, namun kembali meningkat laba yang diperoleh sebesar Rp 1.475.042.200.000 atau 10,66%.

PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) memiliki laba bersih relatif stabil pada tahun 2014-2018, di mana pada tahun 2014 memperoleh laba bersih sebesar Rp 2.122.678.000.000, kemudian di tahun 2015 laba yang diperoleh mengalami penurunan sebesar Rp 2.057.694.000.000 atau 3,06%, namun pada tahun 2016 kembali meningkat yaitu sebesar Rp 2.350.885.000.000 atau 12,47%, pada tahun 2017 kembali meningkat yaitu sebesar Rp 2.453.251.000.000 atau 4,17%, pada tahun 2018 kembali meningkat laba yang diperoleh yaitu sebesar Rp 2.497.262.000.000 atau 1,76%.

Berdasarkan kondisi tersebut, fenomena mengenai perataan laba di Indonesia mungkin terjadi pada beberapa perusahaan dalam deretan Indeks LQ45. Hal ini didukung oleh banyaknya penelitian di Indonesia yang meneliti perataan laba walaupun berbagai macam variabel maupun objek yang berbeda.

Terdapat faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap praktik perataan laba (*income smoothing*) diantaranya adalah *financial leverage*, kepemilikan publik, dan komite audit sebagai variabel independen karena dari variabel-variabel tersebut masih terdapat hasil yang inkonsistensi dari peneliti-peneliti sebelumnya sehingga perlu dilakukan penelitian kembali untuk memperkuat hasil penelitian terhadap perataan laba yang sebelumnya telah diteliti. Latar belakang dari masing-masing variabel independen yang telah disebutkan (*financial leverage*, kepemilikan publik dan komite audit) akan dijelaskan sebagai berikut:

Variabel pertama dalam penelitian ini yaitu *financial leverage*. Menurut Dewantari dan Badera (2015), "*financial leverage* merupakan salah satu rasio keuangan yang menunjukkan seberapa besar utang digunakan untuk membiayai aset atau investasi perusahaan". "Artinya semakin besar utang suatu perusahaan maka semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung oleh para investor" Trisnawati et al. (2017). "Sehingga semakin besar rasio *leverage* perusahaan maka manajer cenderung melakukan praktik perataan laba agar terhindar dari ketentuan-

ketentuan yang tercantum dalam perjanjian utang” Kusumaningrostaty dan Mutasowifin (2014).

Pada penelitian ini *financial leverage* dapat diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) untuk menghitung tingkat utang perusahaan. Perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi, dapat diindikasikan perusahaan cenderung memiliki risiko yang tinggi, dengan tingginya rasio *leverage* menandakan bahwa sebagian besar perusahaan kemungkinan dilakukan praktik perataan laba sehingga menurut investor dapat merugikannya, karena risiko yang diterima juga akan besar. Hal ini sejalan dengan penelitian Putra dan Suardana (2016) dan Ramanuja dan Mertha (2015) yang menyatakan bahwa *financial leverage* dengan menggunakan *debt to equity ratio* berpengaruh positif terhadap *income smoothing* hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai DER, maka semakin tinggi pula indikasi suatu perusahaan melakukan *income smoothing*. Namun tidak semua perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi terindikasikan melakukan praktik perataan laba, berikut merupakan contoh perusahaan yang didapatkan oleh penulis:

Tabel 1.1 *Financial Leverage (DER) Terhadap Income Smoothing*

Kode Emiten	<i>Financial Leverage (Debt to Equity Ratio)</i>	<i>Income Smoothing</i>
	2018	2018
JSMR	3,0803	1,0206
INDF	0,9340	-33,522

Sumber: Data yang telah diolah (2019)

Pada Tabel 1.1 merupakan hasil perhitungan *financial leverage* yang diprosikan dengan *debt to equity ratio* dan *income smoothing* yang diprosikan dengan Indeks Eckel pada tahun 2018. Nilai rata-rata *financial leverage* pada 22 unit sampel perusahaan LQ45 di tahun 2018 adalah sebesar 1,2634. Dalam tabel tersebut mengambil dua sampel perusahaan yaitu JSMR (PT Jasa Marga (Persero) Tbk.) memiliki rasio *leverage* yang sangat tinggi sebesar 3,0803 dengan *income smoothing* sebesar 1,0206 yang diartikan PT Jasa Marga (Persero) Tbk tidak melakukan praktik *income smoothing*, sedangkan PT Indofood Sukses Makmur

Tbk memiliki rasio *leverage* yang lebih rendah dari PT Jasa Marga (Persero) sebesar 0,9340 dengan *income smoothing* sebesar -33,522 yang artinya PT Indofood Sukses Makmur Tbk diindikasikan melakukan praktik *income smoothing*. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya tidak berdampak pada keinginan manajemen dalam melakukan praktik perataan laba. Fenomena ini juga sejalan dengan penelitian Widana dan Yasa (2013) bahwa *financial leverage* yang diukur dengan DER tidak berpengaruh terhadap praktik *income smoothing*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *income smoothing* adalah kepemilikan publik. Menurut Ginantra dan Putra (2015) dalam penelitian Sugiarti (2017), “Proporsi kepemilikan publik yang tinggi dalam suatu perusahaan membuat manajemen selalu dituntut untuk menunjukkan kredibilitas yang baik dengan cara menampilkan performa laporan keuangan yang sesuai dengan keinginan investor”. Hal ini dilakukan agar investor tetap menginvestasikan dana pada perusahaan, karena kondisi tersebut manajemen cenderung melakukan perataan laba agar selalu dapat menampilkan kinerja yang terbaik dalam perusahaan. “Kepemilikan publik diukur dengan persentase *public ownership* (POWN) didapatkan dari persentase jumlah saham yang dimiliki oleh publik” Putra dan Suardana (2016). Hal ini sejalan dengan penelitian Putra dan Suardana (2016) dan Husaini dan Sayunita (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan publik berpengaruh terhadap *income smoothing* dengan kepemilikan publik yang tinggi akan mendorong pihak manajemen perusahaan melakukan praktik perataan laba karena adanya tekanan untuk melaporkan laba yang lebih baik dengan tingkat variabilitas laba yang rendah. Namun dalam variabel kepemilikan publik peneliti menemukan tidak selamanya kepemilikan publik yang tinggi pihak manajemen melakukan praktik perataan laba (*income smoothing*), berikut merupakan contoh perusahaan yang melakukannya:

Tabel 1.2 Kepemilikan Publik (POWN) Terhadap *Income Smoothing*

Kode Emiten	Kepemilikan Publik (POWN)	<i>Income Smoothing</i>
	2018	2018
ASII	0,4984	4,0612
UNVR	0,1501	-0,2816

Sumber: Data yang telah diolah (2019)

Pada Tabel 1.2 merupakan hasil perhitungan kepemilikan publik dan *income smoothing* dengan menggunakan Indeks Eckel pada tahun 2018. Nilai rata-rata kepemilikan publik pada 22 unit sampel perusahaan LQ45 tahun 2018 adalah sebesar 0,3978. Dalam tabel tersebut mengambil dua sampel penelitian yaitu PT Astra International Tbk memiliki kepemilikan publik di tahun 2018 sebesar 0,4984 tetapi hasil *income smoothing* yang diperoleh sebesar 4,0612 dapat diartikan PT Astra International Tbk tidak melakukan perataan laba meskipun memiliki kepemilikan publik yang sangat tinggi, sedangkan PT Unilever Indonesia Tbk memiliki kepemilikan publik di tahun 2018 lebih rendah dari PT Astra International Tbk sebesar 0,1501 dengan hasil *income smoothing* sebesar -0,2816 dapat diartikan PT Unilever Indonesia Tbk diindikasikan melakukan praktik perataan laba. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya kepemilikan saham oleh publik tidak menghambat manajemen untuk tetap melakukan praktik perataan laba. Fenomena ini juga sejalan dengan penelitian Ramanuja dan Mertha (2015) yang menemukan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap praktik *income smoothing*.

Faktor selanjutnya adalah komite audit, menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit pasal 1 yang berbunyi, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu. Tugas pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan. Hal tersebut mencakup *review* terhadap sistem pengendalian internal perusahaan, efektivitas fungsi audit internal, dan kualitas laporan keuangan. Tugas komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan, dan juga kepatuhan terhadap regulasi (www.komiteaudit.or.id).

Dari peraturan dan fungsinya, komite audit seharusnya dapat mencegah praktik perataan laba yang dilakukan oleh manajemen. Pengukuran komite audit dapat dilakukan dengan cara menghitung persentase jumlah komite audit independen di luar komisaris independen terhadap jumlah komite audit. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Soeharto (2018), Komite audit berpengaruh

terhadap praktik perataan laba. Sedangkan, hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh Marpaung dan Latrini (2014), variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap perataan laba. Dewan komisaris membentuk komite audit dengan maksud mengurangi sifat *opportunistic* manajemen, namun komite audit berada pada garis komando dewan komisaris. Ketika dewan komisaris sudah tidak independen, maka independensi komite audit selaku pihak yang bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris patut dipertanyakan serta komite audit didalam perusahaan memiliki wewenang terbatas karena komite audit hanya boleh memberikan saran bagi perusahaan, sehingga ada kemungkinan komite audit tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan dan praktik perataan laba masih mungkin terjadi.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas dapat dilihat terjadinya inkonsistensi penelitian terdahulu dan fenomena-fenomena yang terjadi sehingga penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Financial Leverage*, Kepemilikan Publik, dan Komite Audit Terhadap *Income Smoothing* (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Termasuk Dalam Indeks LQ45 Tahun 2014-2018)**”.

1.3 Perumusan Masalah

Upaya yang dilakukan perusahaan dalam menarik investor untuk berinvestasi salah satunya dengan melakukan perataan laba (*income smoothing*). *Income Smoothing* merupakan upaya untuk mengurangi tingkat fluktuasi laba dari tiap tahunnya agar laba perusahaan terlihat stabil. Investor cenderung memperhatikan ukuran laba yang stabil sebagai keputusan berinvestasi. Hal ini yang mendorong perusahaan melakukan praktik perataan laba, sejalan dengan latar belakang penelitian yang mengkaji terkait perataan laba dengan yang diduga dilakukan oleh beberapa perusahaan yang termasuk dalam Indeks LQ45 tahun 2014-2018.

Salah satu indikator bahwa perusahaan melakukan *income smoothing* adalah laba yang cenderung stabil, namun bukan berarti perusahaan yang memiliki laba stabil pasti melakukan perataan laba. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibuktikan dengan menyertakan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi *income smoothing* seperti *financial leverage*, kepemilikan publik, dan komite audit.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *financial leverage*, kepemilikan publik, komite audit, dan *income smoothing* pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 periode 2014-2018?
2. Apakah terdapat pengaruh secara simultan *financial leverage*, kepemilikan publik, dan komite audit terhadap *income smoothing* pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 periode 2014-2018?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial *financial leverage* terhadap *income smoothing* pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 periode 2014-2018?
4. Apakah terdapat pengaruh secara parsial kepemilikan publik terhadap *income smoothing* pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 periode 2014-2018?
5. Apakah terdapat pengaruh secara parsial komite audit terhadap *income smoothing* pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 periode 2014-2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui *financial leverage*, kepemilikan publik, komite audit dan *income smoothing* pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 periode 2014-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan *financial leverage*, kepemilikan publik, dan komite audit terhadap *income smoothing* pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 periode 2014-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *financial leverage* terhadap *income smoothing* pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 periode 2014-2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kepemilikan publik terhadap *income smoothing* pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 periode 2014-2018.

5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial komite audit terhadap *income smoothing* pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 periode 2014-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari tujuan-tujuan di atas diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai *income smoothing* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk digunakan sebagai referensi pada penelitian berikutnya.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor mengenai faktor-faktor yang dapat memicu praktik *income smoothing* yang dilakukan perusahaan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dan memberikan masukan kepada investor dalam mendorong pengguna laporan keuangan untuk lebih mencermati laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan.

2. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan dalam memperketat pengawasan dalam kegiatan operasional perusahaan serta menjadi pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan perusahaan pada saat penyusunan laporan keuangan. Sehingga dengan penelitian ini diharapkan praktik *income smoothing* dapat diminimalisir.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan sistematika dalam penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika penulisan ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I memberikan penjelasan secara umum, ringkas dan padat mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara aspek teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan tugas akhir secara umum.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II berisikan tinjauan pustaka yang mengungkapkan dengan jelas, ringkas, dan padat mengenai teori agensi, manajemen laba, *income smoothing*, *financial leverage*, kepemilikan publik, dan komite audit. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel dependen dan independen, definisi operasional variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel), serta teknik analisis data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV menguraikan keadaan objek yang diteliti, deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, analisis model dan hipotesis, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (*financial leverage*, kepemilikan publik, dan komite audit) terhadap variabel dependen (*income smoothing*) yang dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V berisi kesimpulan hasil penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil analisis temuan penelitian dan saran secara konkrit yang diberikan terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *income smoothing* dalam aspek praktis dan tujuan pengembangan ilmu.